

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) yang Diselenggarakan Masyarakat

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan Izin dari Ketua Yayasan tentang Izin Pendirian
2.	Proposal Permohonan Izin Pendirian
3.	Hasil Analisis Permohonan Izin Pendirian
4.	Profil sekolah
5.	Akta Notaris tentang pendirian Yayasan/Lembaga Penyelenggara Sekolah
6.	Pengesahan Pendirian Berbadan Hukum Yayasan dari Kemenkum dan HAM
7.	SK Susunan Pengurus Yayasan/Lembaga Penyelenggara Sekolah
8.	Surat Rekomendasi/Usulan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan (KCD)
9.	Surat Keputusan Ketua Yayasan Penyelenggara tentang Pendirian Sekolah
10.	Surat Tugas/Surat Kuasa dari Yayasan Penyelenggara untuk mengurus Izin Pendirian kepada Kepala Sekolah/Wakasek
11.	Surat Rekomendasi Khusus dari Kementerian Agama dan MUI minimal tingkat Kecamatan (Khusus SMA yang berbasis Pesantren)
12.	Surat Keterangan tentang penggunaan kurikulum yang akan dipakai dengan dilengkapi dokumen I (Kurikulum, Dokumen II (Silabus) dan Dokumen -Dokumen Penilaian (Leger/Buku Induk/Rapot/dll) di verifikasi Pada saat Komitmen
13.	Surat dukungan/tidak keberatan bagi warga sekitar sekolah (minimal 20 orang warga ada tanda tangan dan FC KTP (diketahui oleh Ketua RT, RW, dan Lurah/Kepala Desa)
14.	Surat tidak keberatan dari SMA terdekat yang berbeda dalam satu Desa/Kelurahan atau Kecamatan (Minimal 3 SMA)
15.	Surat dukungan dari organisasi profesi di wilayahnya (minimal 3 organisasi) : BPMPS, PGRI, MKKS SMA dll)
16.	Surat dukungan dari pejabat tingkat Kecamatan (muspika) setempat (Camat, Kapolsek, Daramil)
17.	MoU Menginduk ke SMA terdekat yang sudah Terakreditasi
18.	Surat Pernyataan akan mentaati peraturan /perundang-undangan yang berlaku (Bermaterai Rp. 10,000)
19.	Surat Pernyataan tidak akan menempati atau menggunakan fasilitas pemerintah, rumah, kantor (rukan), Rumah Toko (ruko) dan tidak berada pada lingkungan pusat keramaian atau lahan bermasalah (Bermaterai Rp. 10.000)
20.	Sertifikat (Sertifikat Tanah minimal 2000 m2 atas nama Yayasan)
21.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung
22.	Denah Bangunan Sekolah

23.	<p>Memiliki Sarana penunjang dengan ukuran standar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang Kepala Sekolah;</li> <li>Ruang Guru ;</li> <li>Ruang Tata Usaha;</li> <li>Toilet;</li> <li>Memiliki Mebler Kepala Sekolah, Guru, Tata Usaha dan siswa;</li> <li>Ruang Perpustakaan;</li> <li>Memiliki Ruang Kelas/Teori dengan luas minimal 63 m<sup>2</sup>;</li> <li>Memiliki Laboratorium Komputer/Bahasa dan IPA (Kimia, Fisika dan Biologi);</li> <li>Ruang Ibadah (Mesjid/Mushola dll);</li> <li>Instalasi Air Bersih (Sumur bor/ PAM);</li> <li>Instalasi listrik (...kWh);</li> <li>Jaringan Telefon dan Internet (handphone);</li> <li>Lapangan Olah Raga (luas.....m<sup>2</sup>);</li> <li>Lapangan Upacara (Luas.....m<sup>2</sup>);</li> </ol> <p>(dokumentasikan dalam 1 file PDF).</p>
24.	Rekapitulasi data pendidik dan tenaga kependidikan dilengkapi dengan pendidikan dan tugas Masing-masing (Ijazah, Tugas Pokok dan tugas tambahan sebagai perangkat pengelola Sekolah)
25.	Surat Pengangkatan Kepala Sekolah/Guru (Kualifikasi S1/D.IV yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah (SK Pengangkatan, Ijazah dan Sertifikat Pendidikan, Curriculum Vitae)
26.	Surat Pengangkatan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan lainnya meliputi Guru Mata Pelajaran, Guru BK, Tata Usaha, Tenaga Adiministrasi, Teknisi, caraka/Pesuruh/Satpam dan Perangkat Pengelola Sekolah sebagai tugas tambahan misalnya Wali kelas, Wakasek, Laboran, Pustakawan (dilengkapi dengan Ijazah dan akta mengajar/Sertifikat Pendidikan bagi guru)
27.	Memiliki Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS), Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP)
28.	Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Program Kerja Sekolah (PKS) tahun berjalan (Tahun pada saat mengajukan izin)
29.	Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RAKS) untuk tahun pelajaran berjalan memenuhi kebutuhan 8 SNP
30.	Memiliki Rekening Bank untuk keperluan operasional sekolah atas nama Yayasan/Sekolah
31.	Memiliki dana operasional untuk pengembangan sekolah sesuai dengan kebutuhan 8 SNP minimal 1 tahun berjalan ( minimal 60% dan kebutuhan minimal dalam 1 tahun)
32.	Memiliki Siswa (minimal 20 orang/Angkatan)
33.	Data Lulusan SMP/MTs yang tidak diterima di SMA Negeri dalam satu Kecamatan/Kabupaten/Kota
34.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS (Online Single Submission)
35.	Foto Pemohon